



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS PERHUBUNGAN

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Syekh Nawawi Al-Bantani, Palima - Serang - Banten Telp. (0254) 267117 Fax. (0254) 267116

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI BANTEN

NOMOR : 188.4 / 2684 -Dishub.01/2023

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
NOMOR : 188.4/1039-DISHUB.01/2023 TANGGAL 03 MEI 2023 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DAN
PEMBANTU PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PEMBANTU PPTK)
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
TAHUN ANGGARAN 2023
PADA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BANTEN

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BANTEN

Menimbang : Bahwa dengan adanya perubahan anggaran pada Dinas Perhubungan dan untuk tertib administrasi serta kelancaran pelaksanaan program / kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023 pada Dinas Perhubungan Provinsi Banten, perlu dilakukan perubahan Keputusan Kepala Dinas tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Nomor : 188.4/1039-Dishub.01/2023 Tanggal 03 Mei 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Dinas Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (Pembantu PPTK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 pada Dinas Perhubungan Provinsi Banten, dengan keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Banten.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, (Tambahan

- Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
 6. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
 7. Peraturan Gubernur Banten Nomor 29 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2007 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 29 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2019 Nomor 24);
 8. Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Gubernur Banten Nomor : 903/Kep.1-Huk/2023 Tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah, Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah, Pejabat Yang berwenang Mendatangi Surat Perintah Membayar Dan Pejabat Yang Berwenang Mengesahkan Surat Pertanggung Jawaban Pelaksanaan, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, Bendahara pengeluaran Pembantu, Kuasa Pengguna Anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah, Kuasa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Dan Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023, Tanggal 2 Januari 2023;
 2. Keputusan Gubernur Banten Nomor: 821.2/Kep.80-BKD/2022 tentang Pemberhentian Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas serta Pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional di

- Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten;
3. Keputusan Gubernur Banten Nomor: 821.2/Kep.81-BKD/2022 tentang Penugasan Pejabat Fungsional sebagai Koordinator dan Subkoordinator di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten;
 4. Keputusan Gubernur Banten Nomor : 821.2/Kep.1625-BKD/2023 tanggal 02 Mei 2023 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten;
 5. Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Banten Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Nomor DPPA/B.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2023 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023. Tanggal 30 Oktober 2023.

MEMUTUSKAN

- KESATU** : Menetapkan Perubahan Ketiga Atas Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Nomor : 188.4/1039-Dishub.01/2023 Tanggal 03 Mei 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Dinas Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (Pembantu PPTK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 pada Dinas Perhubungan Provinsi Banten, sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas dan Fungsi PPTK dan Pembantu PPTK APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. PPTK**
Mempunya tugas, Mencakup:
 1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan, yang mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyarikatn pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - b. Pembantu PPTK**
Mempunyai Tugas, mencakup:
 1. Mengendalikan pelaksanaan sub kegiatan;
 2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan sub kegiatan;
 3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban

pengeluaran pelaksanaan sub kegiatan, yang mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Serang

Tanggal : 01 November 2023

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI BANTEN**

TRI NURTOPO, MT

Pembina Utama Madya

NIP/ 19660530 199003 1003

Tembusan Yth. :

1. Pj. Gubernur Banten (sebagai laporan);
2. Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Banten;
3. Plt. Inspektur Provinsi Banten;
4. Kepala BAPPEDA Provinsi Banten;
5. Kepala BPKAD Provinsi Banten.

Lampiran I : SK. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Banten

Nomor : 188.4 / 2024 -Dishub.01/2023

Tentang : Perubahan Ketiga Atas Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Nomor : 188.4/1039-Dishub.01/2023 Tanggal 03 Mei 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Dinas Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (Pembantu PPTK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 pada Dinas Perhubungan Provinsi Banten

NO	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	PPTK
1	2	3	4
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	467,578,000	Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Banten
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	23,615,859,000	
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10,514,500	
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	93,250,000	
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,113,706,600	
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	654,240,700	
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9,476,557,800	
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,160,696,400	
9	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	25,610,022,100	Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan
10	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	3,371,900,000	Yulius Anwar, ATD, MT (Analisis Kebijakan Ahli Muda)
11	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	2,107,394,200	Kepala Bidang Angkutan dan Pengembangan Transportasi
12	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1,270,014,800	
13	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi	845,948,000	Kepala Bidang Laut, Udara dan Perkeretaapian
14	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	250,993,000	
15	Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi	1,028,608,000	
16	Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD)	193,390,000	Kepala UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan
17	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD)	133,520,000	
18	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	215,560,500	
19	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	100,000,000	

Serang, 01 November 2023
 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
 PROVINSI BANTEN

TRI NURTOPO, MT
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19660530 199003 1 003

Lampiran II: SK. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Banten

Nomor : 188.4 / 2023 - Dishub.01/2023

Tentang : Perubahan Ketiga Atas Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Nomor : 188.4/1039-Dishub.01/2023 Tanggal 03 Mei 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Dinas Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (Pembantu PPTK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 pada Dinas Perhubungan Provinsi Banten

NO	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	PEMBANTU PPTK
1	2	3	4
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	67,790,000	Agus Sulhi, SE, MM (Perencana Ahli Muda)
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10,000,000	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10,000,000	
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10,000,000	
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	10,000,000	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	245,868,000	
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	113,920,000	
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	22,844,114,000	Ardi Arafah, S.Sos (Staff Pelaksana pada Sekretariat)
9	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	604,830,000	
10	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	88,325,000	
11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1,150,000	
12	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	34,971,000	
13	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	34,944,000	
14	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	7,525,000	
15	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	10,514,500	Kasubag Umum dan Kepegawaian
16	Peningkatan Sarana Dan Prasarana Disiplin Pegawai	93,250,000	
17	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	480,000,000	
18	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	299,206,500	
19	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	45,038,100	
20	Fasilitasi Kunjungan Tamu	47,860,000	
21	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	191,602,000	
22	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	50,000,000	
23	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	654,240,700	
24	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9,476,557,800	
25	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1,147,710,000	
26	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50,000,000	
27	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	962,986,400	
28	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	2,454,560,000	Imam Adi Pribadi, S.Sos, M.Si (Analisis Kebijakan Ahli Muda)
29	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	22,650,542,100	Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
30	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	504,920,000	Kepala Seksi Bina Keselamatan Lalu Lintas

NO	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	PEMBANTU PPTK
31	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	3,147,088,000	Kepala Seksi Perlengkapan Jalan
32	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	224,812,000	Kepala Seksi Prasarana Jalan
33	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	691,506,000	Opi Rafiun Najikh, S.Kom, M.Si (Analisis Kebijakan Ahli Muda)
34	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	729,144,500	Kepala Seksi Pengembangan Transportasi
35	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Province	686,743,700	
36	Penyedia Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	1,270,014,800	Kepala Seksi Angkutan Jalan
37	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	250,993,000	Kepala Seksi Kepelabuhanan dan ASDP
38	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	645,000,000	Siti Maroh, SE (Staff Pelaksana pada Bidang Laut, Udara dan Perkeretaapian)
39	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	200,948,000	Kepala Seksi Perhubungan Udara dan Perkeretaapian
40	Perumusan kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi	1,028,608,000	
41	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	70,000,000	Kasubag Tata Usaha UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan
42	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	70,000,000	
43	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	53,390,000	
44	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	133,520,000	
45	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	215,560,500	Kepala Seksi Sarana Perhubungan Darat dan Pengendalian Operasional Angkutan Pada UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan
46	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	100,000,000	Kepala Seksi Prasarana Perhubungan Laut dan Perhubungan Udara pada UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan

Serang, 01 November 2023
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI BANTEN

TRI NURTOPO, MT
Pembina Utama Madya
NIP. 19660530 199003 1 003